



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSMAN S.,
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 235873

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.256.940.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 16.950 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 161.425.000
3. Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 8.296 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
7. Tanah Seluas 1.700 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 37.400.000
8. Tanah Seluas 19.839 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 297.585.000
9. Tanah Seluas 19.702 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 295.530.000
10. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
11. Bangunan Seluas 91 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG



, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

12. Tanah Seluas 882 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,

HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

34.000.000

1. MOTOR, HONDA F1C02N46LOA/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 15.500.000

2. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

364.605.157

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

2.655.545.157

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.655.545.157

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.